

**PERSFEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL
PEMILIK USAHA DENGAN INVESTOR**
(Studi CV. Alif Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarama
Bandar Lampung)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

**RYAN INTAMI S
NPM. 1421030352**

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H /2018 M**

**PERSFEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL
PEMILIK USAHA DENGAN INVESTOR**

(Studi CV. AlifJabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarama
Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

RYAN INTAMI S

NPM: 1421030352

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Dr. SitiMahmudah, S.Ag. M.Ag.
Pembimbing II : Drs. Zikri

.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Kerjasama yang terjadi di dalam sistem bagi hasil atas kerjasama pemilik usaha dengan investor di CV. Alif Jabon suplier dan pembibitan kayu kehutanan Sukarame Bandar Lampung merupakan kerjasama yang lazim dilakukan para pembisnis. Pendapatan dari investasi di CV. Alif Jabon merupakan hasil kerjasama dari pihak pertama merupakan (pemilik usaha) dan pihak kedua (investor). Sistem bagi hasil pada CV. Alif Jabon berdasarkan perjanjian tertulis dengan sistem presentase berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan kepada pihak pertama (pemilik usaha). Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak pertama melakukan pelanggaran, karena tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga pihak kedua (investor) merasa dirugikan.

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor di CV. Alif Jabon suplier dan pembibitan kayu kehutanan Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor di CV. Alif Jabon suplier dan pembibitan kayu kehutanan Sukarame Bandar Lampung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor di CV. Alif Jabon suplier dan pembibitan kayu kehutanan Sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor di CV. Alif Jabon suplier dan pembibitan kayu kehutanan Sukarame Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena dalam penelitian ini membutuhkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah (*field research*) dan (*library research*). Teknik pengumpulan data, Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Analisa data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dengan pendekatan Induktif. Analisa ini dilakukan secara bertahap dan berlapis dengan menggunakan imajinasi kreatif penulis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor berdasarkan perjanjian secara tertulis. Jika terjadi kerugian dalam kegiatan usaha maka semua kerugian di maksud, menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (pemilik usaha). Realitas dalam pelaksanaannya kerugian tersebut dibebankan kepada pihak kedua (investor). Pandangan hukum Islam tentang sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor sebagaimana disebutkan diatas tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, Sistem bagi hasil semestinya dilakukan sesuai proporsional sesuai dengan hukum Islam, dalam hal ini *mudharabah muthlaqah*, karena *mudharib* (investor) memberi cakupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis kepada *shahibul maal* (pengelola dana). Maka apabila mendapatkan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai nisbah, dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal (investor) selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha. Sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Ryan intami S

NPM : 1421030352

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalah

**Judul : PERSFEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM
BAGI HASIL PEMILIK USAHA DENGAN INVESTOR
(Studi CV. Alif Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu
Kehutanan Sukarame Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

**Dr. Siti Mahmudah. S.Ag., M.Ag.
NIP.196706041997032004**

Pembimbing II

**Drs. Zikri
NIP.196808271994031004**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

**Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil
Pemilik Usaha Dengan Investor (Studi CV. Alif Jabon Suplier dan
Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung)**. Disusun oleh
Ryan Intami S, NPM. 1421030352, Jurusan Mua'malah, telah diujikan dalam
sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 September 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah. S.Ag., M.Ag. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: "Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali Imran ayat 76).¹



¹Q.S. Ali Imran (3):76.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt atas segala limpahan karunia, berkah, nikmat, dan rahmat-Nya, rasa sayang dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang, kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang tersayang:

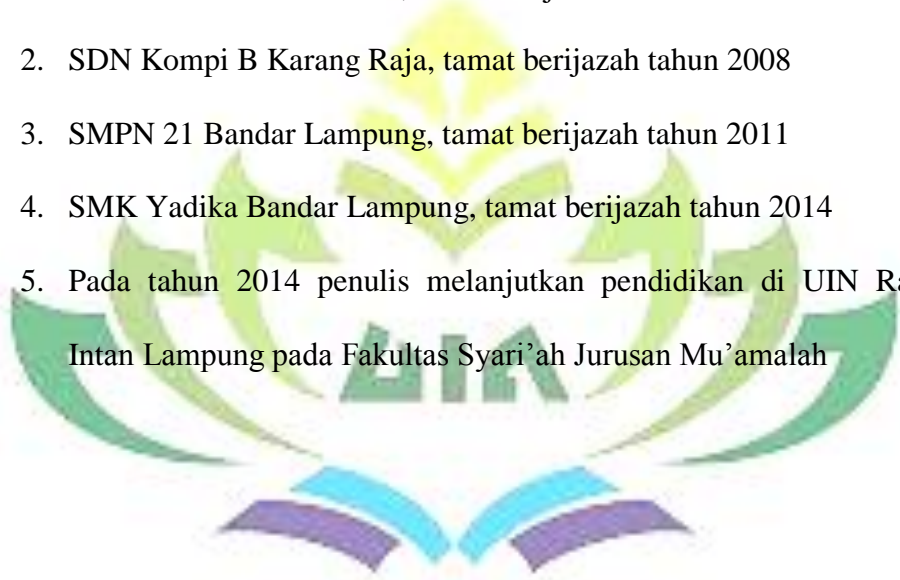
- a. Ayahanda Sarwidi dan ibuku tercinta Hatitah, terimakasih atas setiap tetes keringat yang bapak dan ibu korbankan untukku, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
- b. Adikku tercinta Ronal Fitra Anggana S dan Resti Staysa S yang selalu mendukung, mendo'akan dan memberi semangat motivasi bagi keberhasilan saya selama belajar.
- c. Khusus untuk Almamaterku (UIN Raden Intan Lampung) yang telah memberikan pengalaman yang berharga untuk membuka pintu dunia masa depan dan kehidupan yang akan datang.

RIWAYAT HIDUP

Ryan Intami S dilahirkan di Tanjung Enim pada tanggal 31 Maret 1996, anak pertama dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Sarwidi dan Ibu Hatitah.

Adapun pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. TK Pembina Muara Enim, tamat berijazah tahun 2002
2. SDN Kompi B Karang Raja, tamat berijazah tahun 2008
3. SMPN 21 Bandar Lampung, tamat berijazah tahun 2011
4. SMK Yadika Bandar Lampung, tamat berijazah tahun 2014
5. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pemilik Usaha Dengan Investor. (Studi CV. Alif Jabon Sulier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.M.H. sebagai ketua jurusan/prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya, atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag. dan Drs. Zikri, masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan informasi serta sumber refrensi kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.
7. Direktur dan karyawan CV. Alif Jabon Sukarame Bandar Lampung yang telah membantu dalam proses penelitian sampai penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan Tri Handayani, Eka agung Maylana, Yogi Pratama, Hananto Adi Nugroho, Joko Setiawan, Aditya Dwi Saputra, Septian Hidayat, Safly Andica Rahwan, Hengki Rapiansyah, Iman Suryaman, terimakasih atas semua semangatnya dan selalu ada disaat saya lagi kesusahan.
9. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Syariah Jurusan Muamalah khususnya kelas Muamalah C.

10. Sahabat KKN Gasas Prabowo, Meli, Aris, dan semua teman-teman KKN 119 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas semangatnya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan waktu yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun.

Bandar Lampung, 16 November 2018

Ryan Intami S

NPM. 1421030352

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. PenegasanJudul	1
B. AlasanMemilihJudul	2
C. LatarBelakangMasalah.....	3
D. RumusanMasalah	7
E. Tujuan danManfaatPenelitian	7
F. MetodePenelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	
1. Pengertian Akad	13
2. Dasar Hukum Akad	16
3. Rukund dan Syarat Akad.....	17
4. Macam-macam Akad.....	22
5. AsasBerakaddalam Islam	25
6. Berakhirnya Akad.....	28
B. Mudharabah	
1. Pengertian Mudharabah.....	31
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	34
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	40
4. Jenis-jenis Mudharabah	42
5. Kedudukan Mudharabah.....	43
6. Biaya Pengelolaan Mudharabah	44
7. KetentuanMudharabah.....	46
8. Pembatalan Mudharabah	50
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran UmumCV.Alif JabonSuplier danPembibitanKayuKehutanan Sukarame Bandar Lampung	54
B. Sistem Bagi Hasil PemilikUsaha dengan Investor diCV.Alif JabonSuplier danPembibitanKayuKehutanan Sukarame Bandar Lampung	61

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Sistem Bagi Hasil PemilikUsaha dengan InvestorCV.Alif JabonSuplier danPembibitanKayuKehutananSukarame Bandar Lampung 68
- B. PandanganHukumIslamTerhadapSistemBagiHasilPemilikUsaha dengan InvestorCV.AlifJabonSukarame Bandar Lampung 69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Perspektif Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Pemilik Usaha dengan Investor (*Studi CV. Alif Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung*)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) atau sudut pandang.²
2. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah Swt, yang berkewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban salat, zakat, puasa, haji, syura, denda *akila*. Wahyu yang dimaksud merupakan ketetapan Allah sebagai jawaban atas masalah-masalah yang timbul pada masa diturunkannya, yaitu pada masa Nabi Muhammad Saw, di Makah dan Madinah.³

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1062.

³Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abd Al-Karim* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2016), h.197.

3. Sistem Bagi Hasil (*mudharabah*) adalah memberikan modal dagang kepada seseorang, baik berupa uang, emas, atau harta lainnya dengan kesepakatan bersama bahwa apabila memperoleh laba (keuntungan) dibagi bersama, yaitu untuk orang yang memberi modal dan untuk orang yang memperdagangkan modal, dan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama.⁴
4. Pemilik Usaha (pengusaha) adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dsb)⁵
5. Investor adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.⁶

Jadi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah tentang “Perspektif Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Pemilik Usaha dengan Investor (*Studi CV. Alif Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung*)”.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Objektif

- a. Pembagian hasil dari CV. Alif Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan merupakan suatu hal yang penting dan berkaitan erat untuk

⁴Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.153.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.1538.

⁶*Ibid.*, h.546.

pemenuhan kebutuhan hidup para investor. Oleh karena itu jika praktek pembagian berlangsung secara tidak adil, maka secara tidak langsung praktek tersebut merugikan bagi pihak yang lemah.

- b. Praktek pembagian bagi hasil antara pemilik usaha dan pemilik modal/investor merupakan suatu gejala sosial terutama di kalangan kemitraan dalam bisnis. Praktek ini perlu di kaji untuk menyelaraskan dengan kaidah-kaidah Hukum Islam.

2. Secara Subjektif

- a. Penelitian ini didukung dengan literature atau refrensi yang cukup, sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Selain itu topik yang diangkat sangat membantu dalam mengatasi atau memberi solusi terhadap kehidupan bermasyarakat dan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Berdasarkan data jurusan dan sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas topik ini, sehingga sangat memungkinkan untuk mengagnkat sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

CV. Alif Jabon merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang Suplier Kayu kehutanan dan pembibitan. Selaras dengan meningkatnya permintaan pemerintah maupun swasta, akan kebutuhan kayu sebagai bahan baku kayu olahan dan bahan baku pulp dengan kualitas tinggi, maka para pendiri perusahaan di dunia pertanian dan perkebunan bergagas mendirikan sebuah perusahaan yang dapat memenuhi permintaan akan

kebutuhan kayu yang berkualitas tinggi, dalam operasional pelaksanaan usaha dikelola dengan berpegang pada prinsip bagi hasil. Bagi hasil yang diterapkan di CV. Alif Jabon bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama terhadap pihak pertama sebagai pengelola dana dan pihak kedua sebagai pemilik modal.

Sistem bagi hasil pada CV. Alif Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung berdasarkan perjanjian tertulis dengan sistem presentase berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan kepada pihak pertama (pemilik usaha). Sehingga setiap investor lainnya akan berbeda-beda pendapatannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak pertama melakukan pelanggaran, karena tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Dalam kegiatan perniagaan ada ayat yang menyebutkan bahwa rezeki dari hasil perniagaan itu di perbolehkan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Q.S. Al-Baqarah: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^٧ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَادِّكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^٨ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”⁷

⁷Q.S. Al-Baqarah (1):198.

Pengertian ayat diatas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam mengajurkan untuk berbuat kebajikan tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sebelum melakukan bagi hasil dalam kemitraan bisnis maka perlu adanya perjanjian. Perjanjian disebut “*akad*” kata *akad* berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁸

Kerja sama dalam Islam disebut *al-musyarakah*, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹ Supaya bisnis harus berada pada hal yang *thayyib* (baik), meskipun dalam kualitasnya tidak lebih banyak dari yang jelek (*khabits*).¹⁰

Banyak orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.¹¹ Bagi orang yang memiliki modal, akan tetapi tidak memiliki keahlian dalam menjalankan roda perusahaan dan ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, akan tetapi tidak mempunyai waktu, dan sebaliknya.¹²

⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.68.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.90.

¹⁰Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.90.

¹¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h12.

¹²M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.169.

Bagi mereka yang tidak memproduksi hartanya, Islam menganjurkan untuk memberikan modal (*dana*) kepada yang membutuhkan modal demi kelancaran usaha mereka dengan prinsip “*mudharabah*” yaitu kontrak (*perjanjian*) antara pemilik modal (*sahihbul mall*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*sahihbul mall*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.¹³

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali masalah-masalah yang timbul antara orang satu dengan orang yang lain, dalam melakukan sesuatu perikatan atau kerjasama yang menghasilkan sebuah manfaat bagi orang tersebut, penulis akan membahas tentang bagi hasil antara pemilik usaha dan pemilik modal (investor). Penulis memandang bahwa tulisan tentang sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan investor belum ada yang membuatnya dalam bentuk suatu tulisan karya ilmiah (skripsi). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa dengan judul : “Perspektif Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil Pemilik Usaha dengan Investor (Studi CV. Alif Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung).”

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, h.195.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka terdapat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor di Cv. Alif Jabon suplier dan pembibitan kayu kehutanan Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui detail tentang mekanisme bagi hasil pemilik usaha dengan investor di Cv. Alif Jabon suplier dan pembibitan kayu kehutanan Sukarame Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil pemilik usaha dengan investor.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara *teoritis*, diharapkan agar mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor dalam hukum islam dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya keilmuan serta pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu juga diharapkan menjadi simulasi bagi

penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara *praktis*, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembaca dijadikan landasan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan salah satu metode ijtihad dalam melakukan sistem bagi hasil dan sosialisasi sekaligus memperjelas teori dan sistem bagi hasil. penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena dalam penelitian ini membutuhkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Dalam hal ini peneliti mengambil objek data penelitian di CV. Alif Jabon Sukarame Bandar Lampung.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁴ Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan (*literatur*), baik

¹⁴*Ibid.*, h.4.

berupa buku, catatan, artikel, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail/secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁵ Di dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai sistem bagi hasil antara pemilik usaha dengan investor yang ditentukan di awal dan jumlah nominal yang menetapkan tinjauan hukum Islam terhadap kejadian tersebut.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh/bersumber langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Sumber data utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari pemilik usaha (pengusaha) dan pemilik modal (investor).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-quran, hadist, kitab-kitab fiqh, buku-buku dan literature yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini kemudian digunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

¹⁶Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut populasi sensus.¹⁷ Pada penelitian di lapangan ditemukan populasi yang berjumlah <100 orang dalam hal ini adalah CV. Alif Jabon.

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁸ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *proposive sample*, yaitu sampel yang bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 orang sebagai berikut:

- a. Karyawan dari CV. Alif Jabon sebanyak 4 orang
- b. Investor CV. Alif Jabon sebanyak 8 orang

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan format atau blanko yang disusun berisi item-item tentang kejadian dilapangan.²⁰ Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.102.

¹⁸*Ibid.*, h.108.

¹⁹*Ibid.*, h.174.

²⁰Muhammad Pabundu Tika, *Op. Cit.*, h.204.

secara langsung ke CV. Alif Jabon yang melakukan bisnis suplier dan bibit kehutanan dengan cara observasi ini peneliti dapat memperoleh data yang utuh, baik dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek yang dalam penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah salah satu metode pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung.²¹ Dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pemilik usaha dan juga kepada investor yang menanamkan modalnya di CV. Alif Jabon tersebut untuk mengetahui sistem bagi hasil dan ditinjau dalam hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.²² Dokumentasi biasanya berbentuk data mengenai hal-hal variabel berupa buku, catatan, foto, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi ini untuk memperoleh bukti tertulis tentang praktik sistem bagi hasil atas kerjasama pemilik usaha dan investor di CV. Alif Jabon.

6. Pengelolah Data

Apabila data telah terkumpul maka akan dilakukan pengelolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

²¹Sugiyono, *Op.Cit.*, h.137.

²²Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h.206.

- a. *Editing* adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan, keseragaman satuan data, sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan ataupun dari literature.
- b. *Sistematic* adalah melakukan pengecekan data/bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh²³

7. Analisis Data

Data yang telah di kemukakan dan diolah secara kualitatif dalam penelitian ini di analisis berdasarkan analisa deskriptif kualitatif secara bertahap dan berlapis. Analisa bertahap dilakukan sejak awal pengumpulan data sedikit demi sedikit. Analisa berlapis dilakukan setelah keseluruhan data yang telah diolah secara kualitatif dalam rangka menganalisa apa yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah penelitian ini. Sehingga diperoleh jawaban rumusan masalah tersebut yang dituangkan dalam kesimpulan sebagai bab penutup dalam penelitian ini. Adapun metode berfikir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik genralisasi yang mempunyai sifat umum.

²³Noer Saleh, Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h.16.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab qabul* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syar'at yang berpengaruh pada objek perikatan.²⁴ Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam.²⁵

Menurut bahasa *Aqad* mempunyai beberapa arti antara lain: ²⁶

- a. Mengikat yaitu Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya
- c. Janji yaitu ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ (Q.S. Ali Imran ayat 76)

²⁴A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir* (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984), h.197.

²⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.68.

²⁶A. Warson Al-Munawir, *Op. Cit.*, h.200.

Artinya: "Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali Imran ayat 76).²⁷

Istilah *ahdu* dalam Al Qur'an mengacu kepada penyertaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dal surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*)²⁸.

Akad (ikatan, keputusan, atau pengetahuan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul

²⁷Q.S. Ali Imran (3):76.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.45.

(pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁹

Menurut Pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan, "pertemuan ijab yang dianjurkan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek akad." Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah "pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya."³⁰ Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak keinginan pihak-pihak yang mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijan* dan *qabu*.³¹

Ijab adalah pernyataan pertama yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri. Jadi setiap pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan *mujib* (pelaku *ijab*) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah *ijab* disebut

²⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.35.

³⁰ Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h.68.

³¹ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhui al-Fiqhi al-'Am al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h.329.

dengan *qabil* (pelaku *qabul*), tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu³²

2. Dasar Hukum Akad

a. Surat Ali-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*Artinya: "Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali Imran ayat 76)."*³³

Makna dari ayat tersebut adalah Allah menyangkal pendapat orang-orang Bani Israel pada (Q.S. Ali Imran: 75) yang menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi mereka apabila melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam. Kemudian Allah menegaskan supaya setiap orang selalu menepati segala macam janji dan menunaikan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Karena itu, jika ada orang yang meminjamkan harta dengan penetapan waktu, hendaklah dipenuhi janji itu dengan mengembalikan harta itu tepat pada waktunya. Allah menyebutkan pahala bagi orang-orang yang sudah menepati janjinya karena termasuk dalam kategori takwa. Keterangan ini untuk memberikan pengertian bahwa menepati janji termasuk perbuatan yang diridhai Allah.

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h.98.

³³Q.S. Ali Imran (3):76.

b. Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ ءَلَّا نَعْمَ إِلَّا مَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Makna ayat tersebut adalah permulaan ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun yang dibuat diantara sesama manusia tersebut kontrak bisnis. Perkataan aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, bila seseorang mengadakan janji kemudian orang lain menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan ('aqad). Semua perikatan dapat dilakukan asal tidak melanggar ketentuan Allah.

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak bagi kedua belah pihak haq

dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:³⁴

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapaorang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yag memiliki haq.
- 2) *Ma'qud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kalafah.
- 3) *Maudhu'al aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- 4) *Shighat al aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama bahwa rukun akad terdiri dari atas³⁵

³⁴Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.46.

- a) Pernyataan untuk mengikat dari (*sighat al aqd*)
- b) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
- c) Objek akad (*al- ma'qud alaih*)

Menurut Ulama Hanafiyah, sebagai dikutip oleh Racmat Syafe'i, yang berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *Sighat al-aqd* (*ijab* dan *qabul*), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objeknya akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah esensi yang berada dalam akad itu sendiri sedangkan pihak-pihak yang berakad dalam objek akad berbeda diluar esensi.³⁶

b. Syarat Akad

Syarat menurut Abu Wahab Khalaf yaitu sesuatu yang akan status adanya hukum karena adanya syarat dan ketiadaan syarat berakhir ketiadaan hukum.³⁷ Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menentukan hukum tersebut sah atau tidaknya, dengan kata lain hal yang penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum. Untuk melangsungkan suatu akad yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan akad tersebut.

Syarat-syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua macam yaitu:³⁸

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

³⁵ Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h.2.

³⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.43.

³⁷ Abu Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Terj). Nasroen Haroen (Jakarta: CV. Amzah, 1992), h.118.

³⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.49.

- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

Menurut Hendi Suhendi, bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad adalah:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berbeda di bawah pengampunan (*mahjur*) karena boros atau yag lainnya.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli *mulsamah*.
- e) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang beijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- g) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum akadnya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Sedangkan menurut Nasroen Harun,³⁹ bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad, yaitu:

³⁹Nasroen Haroen, *Op. Cit.*, h.101-104.

(1) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf) atau jika objeknya akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz secara langsung, hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka dan sifat akad yang dilakukan memberi manfaat bagi orang-orang yang diampuninya, maka akad itu hukumnya sah.

(2) Objek akad itu diakui oleh syara, untuk objek akad ini disyaratkan pula:

- (a) Berbentuk harta,
- (b) Dimiliki oleh seseorang, dan
- (c) Bernilai harta menurut syara.

Oleh sebab itu jika objeknya akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam islam, maka akadnya tidak sah.

(3) Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat atau hadis) syara

(4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya, disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad ini juga harus memiliki syarat-syarat khususnya.

(5) Akad itu bermanfaat.

(6) Pernyataan ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak sah lagi ketika qabul diucapkan, maka akad itu tidak sah.

(7) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

(8) Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara. Tujuan akad ini terkait erat dengan bentuk akad yang dilakukannya.

4. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantaran objeknya. Hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara. Maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai keterangan akad tersebut:⁴⁰

a. Akad Shahih

Akad shahih yaitu merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang beraqid. Akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Aqad Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), h.231.

2) *Aqad Mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti aqad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyis*.

b. Akad Tidak Shahih

Akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiah membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: *aqad batil* dan *aqad fasid*. Suatu akad dikatakan *batil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara. Sedangkan *aqad fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.⁴¹

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.⁴²

- 1) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

⁴¹*Ibid.*, h.242.

⁴²Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.50-51.

- 3) *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu akad, tetapi mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan berikut:⁴³

- a) Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, taitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk seperti dibawah ini.
- (1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran hutang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.
- (2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan *naib*, wali pengantin laki-laki da wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat di hadapan *naib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.

⁴³*Ibid.*, h.51-52.

(3) *Mu'awadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batiniah untuk keperluan orang lain, kemudian diatur sesuai surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).

b) *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut, dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya karinah *hazl* kecerdasan kehendak disebabkan hal-hal berikut: (1) *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridhaan, (2) *Khilabah* ialah bujukan membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad, dan (3) *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin.

5. Asas Berakad dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, bisnis, dan pondasi, fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental, dan prinsip. Prinsip yaitu

dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya.⁴⁴

Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis, yaitu:⁴⁵

a. *Asas Ilahiah*

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai kebutuhan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

b. *Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)*

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan

⁴⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h.91.

⁴⁵Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badrul Zaman (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001), h.249.

perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.⁴⁶

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatau perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

d. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.⁴⁷ Dalam asas ini, para pihak yang melakukan kehendak dan keadilan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajiban.

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam Q.S. *an-Nisa* (4):29 dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-

⁴⁶Ahmad Izzan, *et al.*, *Refrensi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.40.

⁴⁷Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hanafidhuiddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. 1 (Jakarta: Robani Pers, 1977), h.396.

masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil *al-aqdu bil bathil*).⁴⁸

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidak jujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.

g. Asas Tertulis (*Al-Kitanah*)

Dalam Q.S. *al-Baqorah* (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah swt menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihindari oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individual yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa dapat dipegang suatu perikatan dilakukan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan. Adanya tulisan, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.

6. Berakhirnya Akad

Suatu akad akan berakhir apabila telah mencapai tujuan. Misalnya dalam melakukan kerjasama, akad dikatakan berakhir bila keuntungan dan kerugian telah disepakati. Akad berakhir dengan adanya *fasakh*, yaitu pihak-

⁴⁸Djamil, *Op. Cit.*, h.250.

pihak akad sepakat membatalkan akad dan *infasakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.⁴⁹

a. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat ketidak jelasan.
- 2) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, dan majekis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan yang lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya kepada tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 6) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian.

b. Berakhirnya Akad dengan *Infasakh*⁵¹

- 1) Selesai Masa Kontrak

⁴⁹Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami* (Jeddah: Dallah al-Baraka, 1993), h.128.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.152.

⁵¹Izzudin Muhammad Khujah, *Op. Cit.*, h.130.

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut ditentukan waktunya seperti ijarah atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti uang terlunasinya dalam akad *kafalah* dan wakil merealisasikan tugasnya dalam akad *wakalah*.

2) Kontrak Tidak Mungkin Dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

3) Pelaku akad meninggal dunia

Akad berakhirnya dengan meninggalnya pelaku akad. Jika meninggal salah satu pihak-pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

4) Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* bisa juga oleh kedua pihak akad atau oleh pengendalian untuk menghindari *fasid* dalam akad. Misalnya menjual sesuatu yang tidak jelas spesifikasinya atau menjual sesuatu dengan dibatasi waktu. Jual beli semacam itu dipandang *fasid* dan karena harus *fasakh*, baik oleh para pihak yang berkontrak maupun oleh hakim, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan *fasakh* tidak dapat dilakukan seperti pihak pembeli telah menjual barang yang dibelinya.⁵²

⁵²*Ibid.*, h.131.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau *Qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutkannya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian *Mudharabah* dengan *qiradh* dua istilah untuk maksud yang sama.⁵³ *Mudharabah* berasal dari kata *al-qar*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan.⁵⁴ Secara terminologi *mudharabah* adalah menyerahkan harta yang terukur kepada orang yang akan memutarnya dalam perdagangan dengan mendapatkan sebagian dari labanya.⁵⁵ Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang bisa diartikan berpergian hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An Nisa ayat 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ...

"dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah berdosa kamu men-qashar sholat."⁵⁶

Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian atau kecurangan

⁵³Rahmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h.223.

⁵⁴Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.135.

⁵⁵Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap* (Jakarta, Darul Falah, 2005), h.614.

⁵⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, *Op. Cit.*, h.195.

si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas resiko tersebut.⁵⁷ Selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola, dan seandainya kerugian itu disebutkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.

Menurut istilah *syara' mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satunya memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi antara mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵⁸ Berdasarkan ahli fiqh *mudharabah* merupakan satu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan diperoleh akan di bagi berdasarkan porsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya.⁵⁹ hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah “semacam syirikat aqad, bermukafat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-ketentuannya dibagi diantara mereka.”⁶⁰

Ada satu titik pemisah antara *mudharabah* dengan jenis perkongsian lain. Semua jenis perkongsian lain mungkin mengandung dua orang atau lebih, sedangkan *mudharabah* hanya terdiri dari dua orang saja, yaitu seorang

⁵⁷Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.95.

⁵⁸Karim Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.11.

⁵⁹Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2004), h.65.

⁶⁰Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalat* (Jakarta: Bulan Bintang), h.90.

pemilik modal dan seorang lagi agennya. Pemilik modal menginvestasikan modalnya dan agen merupakan orang yang ahli untuk menjalankannya, sedangkan jenis perkongsian lainnya mengandung arti dimana pihak-pihak yang berkongsi merupakan agen antar sesamanya dan masalah yang demikian tidak terdapat dalam *mudharabah*.⁶¹

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah saw. Sejak zaman jahiliah/sebelum Islam dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini: *qira*, *muqarabah*, dan *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsipnya. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh factor geografis.⁶² Kerjasama dalam bentuk ini disebut dengan *mudharabah* oleh para ulama Iraq, dan disebut *qira* dan oleh ulama Hijaz.⁶³ Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola modal untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁶⁴

Praktek di perbankan syariah, sebagaimana terletak dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik/shahibul mall atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil/mudharib) yang

⁶¹Muhammad Muslehuddin, *Op. Cit.*, h.63.

⁶²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, *Op. Cit.*, h.195.

⁶³Ali Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam; Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2004), h.16.

⁶⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, *Op. Cit.*, h.196.

bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁶⁵ Menurut Fatwa DSN-MUI, *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka yang sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁶⁶

2. Dasar Hukum Mudharabah

Banyak ayat al-Quran dan hadits Nabi saw yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukannya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makan dan minuman. Manusia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantaranya pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduksi

⁶⁵ Penjelasan Pasal 19 huruf c UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁶⁶ Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

uangnya, sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut.

Menurut Ibnu Taimiyah, landasan legal yang membicarakan tentang *mudharabah* berdasarkan beberapa laporan dari sahabat Nabi saw, akan tetapi hadist tersebut sanadnya tidak otentik sampai pada Nabi.⁶⁷ Sedangkan Ibn Hazm mengatakan bahwa tiap-tiap bagian dari fiqh berdasarkan al-Quran dan sunnah kecuali *mudharabah*. Dimana kita tidak menemukan dasar apapun tentangnya.⁶⁸ Serakhshi yang merupakan ulama mazhab Hanafiah mengatakan, *mudharabah* diperoleh karena orang membutuhkan akad ini.⁶⁹

Mudharabah tidak merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang diterapkan oleh kaum muslim, dan bentuk kerjasama perdagangan model ini terus dilakukan sepanjang masa awal islam sebagai *instrument* utama yang mendukung para kafilah untuk mengembangkan dagangannya secara luas.⁷⁰ Adapun landasan hukum bagi hasil dalam islam menurut Al-Quran, Hadits, *Ijma'* Ulama, dan Qiyas yaitu:

⁶⁷Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatwa Syaikh Al Islam* (Mecca: Maktabat Al-Nahda Al-Haditha, 1404 H), h.101.

⁶⁸Shawkani, *Nayl Al-Awtar* (Istanbul: Dar Al-Dakwah Al-Islamiyah. Tanpa tahun), h.267.

⁶⁹Sarakhsi, *Kitab Al-Mahsuh* (Istanbul: Dar Al-Dakwah, 1983), h.19.

⁷⁰Qureshi, *Mudharabah and Its Modern Application* (Lahore: Muhammad Ashraf, 1967), h.19.

a. Al-Quran

Adapun beberapa acuan yang umum diantaranya terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20 Allah berfirman :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..”, (QS. Al-Muzammil: 20).⁷¹

Pada ayat Al-Quran yang lain disebutkan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS. Al Jum'ah; 10).⁷²

Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 198 Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah: 198).⁷³

⁷¹Q.S. Al-Muzammil (73):20.

⁷²Q.S. Al-Jum'ah (62):10.

⁷³Q.S. Al-Baqarah (1):198.

Berdasarkan ayat ini Abu Ja'far menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah wahai orang yang beriman tidak ada dosa bagi kamu dan maka yaitu جُنَاحٌ dosa, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk melakukan jual beli sebelum sesudah ihram. Ayat ini turun terhadap suatu kaum yang enggan berdagang ketika melakukan ihram dengan harapan mendapatkan kebaikan dengan perbuatan tersebut, maka Allah memberitahukan bahwa tidak ada kebaikan dalam sikap tersebut, dan diperbolehkan bagi mereka untuk mencari karunia-Nya dengan jual beli.⁷⁴ Secara umum ayat al-Muzammil mencerminkan anjuran agar umat muslim melakukan usaha dengan cara berniaga disebabkan ayat di atas menunjukkan kata *ya ribuun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha.⁷⁵

Hubungan ketiga ayat di atas adalah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau bisnis lainnya seperti usaha yang ada pada sistem bagi hasil *mudharabah dan syirkah* salah satunya. Di samping itu, Al-Quran tidak secara langsung

⁷⁴Abu Ja'far Muhammad bun Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al-Quran* :penerjemah, Ahsan Askan; Editor, Besus Hidayat Amin, Akhmad Affandi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.417.

⁷⁵Muhammad Syafiie Antonio, *Bnak Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.95.

menunjukkan istilah mudharabah melainkan melalui hasil kata arab yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah kemudian mengalami konsep mudharabah, meskipun tidak disangkal bahwa mudharabah suatu perjalanan jauh yang bertujuan bisnis dan mencari keuntungan⁷⁶. Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerjasama berdasarkan prinsip ini.⁷⁷

b. Hadist

Kemudian Rasulullah saw menegaskan dalam beberapa sabda beliau yang membolehkan dan menganjurkan seorang muslim untuk saling menolong sesamanya dalam akad bagi hasil baik *mudharabah* maupun *musyarakah*. Seperti dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ : إِنْ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرَكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتَ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود والحاكم)

Artinya :

*Dari Abu Hurairoh Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah berfirman Aku pihak ketiga dari dua orang yang beryarikatan selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. (HR. Abu Dawud dan Hakim.).*⁷⁸

Hadist *qudsi* di atas menunjukkan kecintaan Allah kepada orang yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat dan menjauhi pengkhianatan.

⁷⁶Asad Muhammad, *The Message of the Quran* (Gibraltar: Dar Al Andalus, 1985), h.92, 905.

⁷⁷ Ibnu Hishan, *Al Syirat Al Nabawiyah* (Kairo: Mustafa Al Babi Al Halabi, 1955), h.188.

⁷⁸Abu Daud, *Kitab Sunah Darul Fikri*, Jilid 2, Bairut, 1994/1414, h.127.

c. *Ijma'* Ulama

Telah diriwayatkan dari Darul Quthni ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu membawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu maka kamu harus bertanggung jawab terhadap hartaku.⁷⁹

Dalam Muwatha Imam Malik, dari Al-A'la Ibn Abdurahman Ibn Ya'qub dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Usman R.A sedang keuntungannya dibagi dua. Kebolehan *mudharabah* juga dapat di-*qiyas*-kan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan) selain itu kebolehan praktik *mudharabah* merupakan *ijma'* ulama.

Dalam prakteknya penulis menilai bahwa sampai saat ini perkongsian (*mudharabah*) seperti diatas dipergunakan untuk menjalankan bisnis, baik dalam usaha bermodal kecil maupun dengan proyek usaha membutuhkan modal besar serta mobilisasi kerja yang lebih komplit. Mudharabah tidak hanya merujuk langsung kepada al-Quran dan sunnah, tetapi berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang dipraktekkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama perdagangan dan usaha modal ini berlangsung hingga saat ini.

⁷⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, h.196.

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* di *qiyas* kan terhadap transaksi musaqah.⁸⁰

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun *mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu: (1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya; (2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang; (3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang; (4) Maal, yaitu harta pokok atau modal; (5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba; dan (6) Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:⁸¹ (1) *Shahib al-mal*/ pemilik modal; (2) *Mudharib*/pelakuusaha; dan (3) Akad. Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

b. Syarat *mudharabah*

Syarat-syarat sah berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* sebagai berikut:⁸²

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tebar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

⁸⁰*Ibid.*, h.207.

⁸¹*Ibid.*, h.197.

⁸²*Ibid.*, h.198.

- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masi kecil, orang gila, dan orang-orang yang berbeda di bawah pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibandingkan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal-misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua-dan kabul dari pengelola,dan
- 6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelolaan harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, mudharabah tersebut sah.⁸³

⁸³Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.140.

4. Jenis-jenis Mudharabah

Dalam kaitannya dengan pekerjaan, atau usaha yang dilakukan oleh pengusaha, *mudharabah* dapat dibedakan menjadi akad *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. berikut adalah jenis-jenis dari *mudharabah* :

(1) *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam akad *mudharabah Muthlaqah*, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya, sehingga dalam akad ini pekerjaan atau bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha bersifat mutlak.⁸⁴

Ketentuan yang harus ada dalam *mudharabah muthlaqah* yaitu:

- 1) Pendapatan atau keuangan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- 2) Pemilik akad tidak boleh ikut serta dapat berupa pengelolaan usaha, tetapi dibolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. Mudharib mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
- 3) Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

⁸⁴Hasni Ahmad Said & Faturrahman Rauf, *Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-⁴ Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syri'ah IAIN RIL., Vol.XII, No. 3, Juni 2015), h.495.

- 4) Pemilik modal (tabungan mudaharabah) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.
- 5) Deposito mudhrabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6 atau 12 bulan.

(2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyah yaitu, dimana pemilik usaha (*mudharib*) dibatasi haknya oleh pemilik modal (*shahibul maal*), antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha, dll. pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pemberian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan. Demikian pula menyadarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Imam Hanifah dan Ahmad, dan tidak dibolehkan menurut Imam Malik dan Syafi'i.⁸⁵

5. Kedudukan Mudharabah

Kedudukan *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah (qiradh)* juga tergantung pada keahliannya. Karena pengelola modal perdangangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah'alaih* (objek wakalah). Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h.372.

dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut kedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaiian pengelola, ia wajib menanggungnya.⁸⁶

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri dari atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelola uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai syirkah. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa-menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*. *Ghasab* adalah *min al-kabir*.⁸⁷

6. Biaya Pengelolaan Mudharabah

Biaya bagi *mudharib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjanjian untuk kepentingan *mudharabah*. Bila biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau

⁸⁶Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.141.

⁸⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Qolam, t.th), h.42.

bahkan lebih besar dari pada keuntungan, namun jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *mudharabah* guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan.⁸⁸

Kiranya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan *mudharabah* pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik; menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-mal* dalam manajemen proyek. Sebagai otang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Adapun sebagai wakil *shahibul al-maal* dia harapan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.⁸⁹

Menurut Adiwarman A. Karim ada beberapa ketentuan umum skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁹⁰

- (1) jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang

⁸⁸Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.141.

⁸⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, *Op. Cit.*, h.218.

⁹⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.104.

dinyatakan nilainya dalam satuan uang, apabila modal diserahkan secara bertahap, harusnya jelas tahapannya dan disepakati bersama.

- (2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat di perhitungkan dengan cara, yakni: perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing). Perhitungan dari keuntungan proyek.
- (3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selalu pemilik penyimpanan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- (4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau urusan nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

7. Ketentuan Mudharabah

Ketentuan *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:⁹¹

Pasal 238

- (1) Status benda yang berbeda di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul al-mal* adalah modal.
- (2) *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.

⁹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, h.200-203.

- (3) Ketentuan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama.

Pasal 239

- (1) *Mudharib* berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- (2) *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- (3) *Mudharib* berhak menerima pembayar dari harga barang dengan pengalihan piutang.
- (4) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 240

Mudharib tidak boleh menghabiskan, menyedekahkan, dan, atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal

Pasal 241

- (1) *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad *mudharabah*.
- (2) *Mudharib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan sistem syariah.
- (3) *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai kesepakatan dalam akad.

Pasal 242

- (1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- (2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.

Pasal 243

- (1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- (2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.

Pasal 244

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Pasal 245

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapatkan izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-mal* dengan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *Mudharib* dalam rangka menjalankan bisnis kerja sama, dibedakan pada modal dari *shahib al-mal*.

Pasal 248

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/ atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

Pasal 250

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 251

- (1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- (2) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
- (3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan ketentuan kepada pemilik pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *mudharabah*.

(4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* dan/ atau melalui pengadilan.

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 253

Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum

Pasal 254

- (1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

8. Pembatalan Mudharabah

Dalam praktiknya, kontrak bisa terjadi pembatalan sebelum dilaksanakan. Ada beberapa sebab pembatalan penawaran (ijab), yaitu sebagai berikut:⁹²

- a. Pembatalan oleh pembuat penawaran. Menurut ulama, penawaran atau perjanjian bisa dibatalkan sebelum terjadinya penerimaan (qabul) oleh

⁹²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, Op. Cit.*, h.151.

pihak kedua. *Pembolehan* pembatalan ini karena pihak yang akan menerima belum terjadi.

- b. Kematian salah satu pihak atau hilangnya kemampuan. Kematian salah satu pihak menyebabkan hilangnya penawaran atau perjanjian.
- c. Penolakan penawaran yang dilakukan dengan ucapan atau tindakan.
- d. Berakhirnya tempat perjanjian. Penawaran dapat dibatalkan dengan berakhirnya tempat perjanjian sebelum penerimaan (*qabul*) dari pihak lain (kedua).
- e. Kerusakan objek yang akan ditransaksikan baik sebagian atau seluruhnya.

Menurut Hendi Suhendi *mudharabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:⁹³

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

⁹³Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.143.

- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah satu seseorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

Batalnya *Mudharabah* menurut Racmat Syafe'i sebagai berikut:⁹⁴

a) *Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan*

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

b) *Salah Seorang Aqid Meninggal Dunia*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

⁹⁴Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Puataka Setia, 2001), h.237.

c) *Salah Seorang Aqid Gila*

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d) *Pemilik Modal Murtad*

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa orang murtad dibagikan di antara para ahli waris.

e) *Modal Rusak di Tangan Pengusaha*

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak *mudharabah* batal.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum CV.Alif Jabon Supplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya CV. Alif Jabon

CV.Alif Jabon didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Dwi Shinta Handini Putri, SH. M.Kn No. 104/KEP-17/III/2011 TGL 31 Maret 2011 dan diubah dengan perubahan anggaran dasar CV. Alif Jabon 174 tanggal 22 Oktober 2015 dengan Akta Notaris Dwi Shinta Handini Putri, SH. M.Kn. Akta pendiri tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan Nomor M-09-HT-03.01-Th. 1989 tanggal 14 Januari 1989 dan telah didaftarkan dalam buku daftar untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1B Metro nomor 52/CV/2015/PN Metro.

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami perubahan, CV Alif Jabon No. 174 Tanggal 22 Oktober 2015 dengan Akta Notaris Dwi Shinta Handini Putri, SH. M.Kn. Sesuai dengan pasal 2 anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah bergerak dalam bidang pengadaan, untuk kebutuhan perkebunan Hortikultura.

CV.Alif Jabon merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang Suplier Kayu Kehutanan dan Pembibitan. Selaras dengan meningkatnya permintaan pemerintah maupun swasta akan kebutuhan kayu sebagai bahan baku olahan dan bahan baku pulp dengan kualitas tinggi, maka para pendiri perusahaan yang telah lama malang melintang di dunia pertanian dan

perkebunan bergagas mendirikan sebuah perusahaan yang dapat memenuhi permintaan akan kebutuhan kayu yang berkualitas tinggi. Sebagai, Pelaku dan Praktisi Pertanian dan Suplier serta Pembibitan Kayu Kehutanan, yang mana dalam pelaksanaan oprasional usaha dikelola dengan berpegang kepada Prinsip Bagi Hasil. Perusahaan bergerak dalam bidang Agri Bisnis terutama dalam pembibitan kayu dan Investasi tanaman Industri lainnya. Juga untuk membantu memaksimalkan sumber daya manusia dikalangan tingkat petani secara efektifitas dan efisiensi dalam meningkatkan lahan yang kurang produktif.⁹⁵

2. Visi dan Misi CV. Alif Jabon

VISI

Memenuhi dan mendukung pelestarian lingkungan dengan pemanfaatan Hutan Rakyat dengan membangun dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta mengisi industri bibit unggulan dalam mendorong dan menghijaukan kembali pembangunan yang berkelanjutan secara utuh dengan menghasilkan bahan tanaman berkualitas prima dan dapat memberikan peran optimal untuk memperkuat perekonomian nasional.

MISI

- a. Menjadi perusahaan yang mampu memproduksi tanaman unggulan yang berkualitas dan bernilai yang dapat dibutuhkan secara ekonomis dan menguntungkan secara komersial.

⁹⁵*Profil* CV.Alif Jabon Supplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan pada tanggal 19 Agustus 2018.

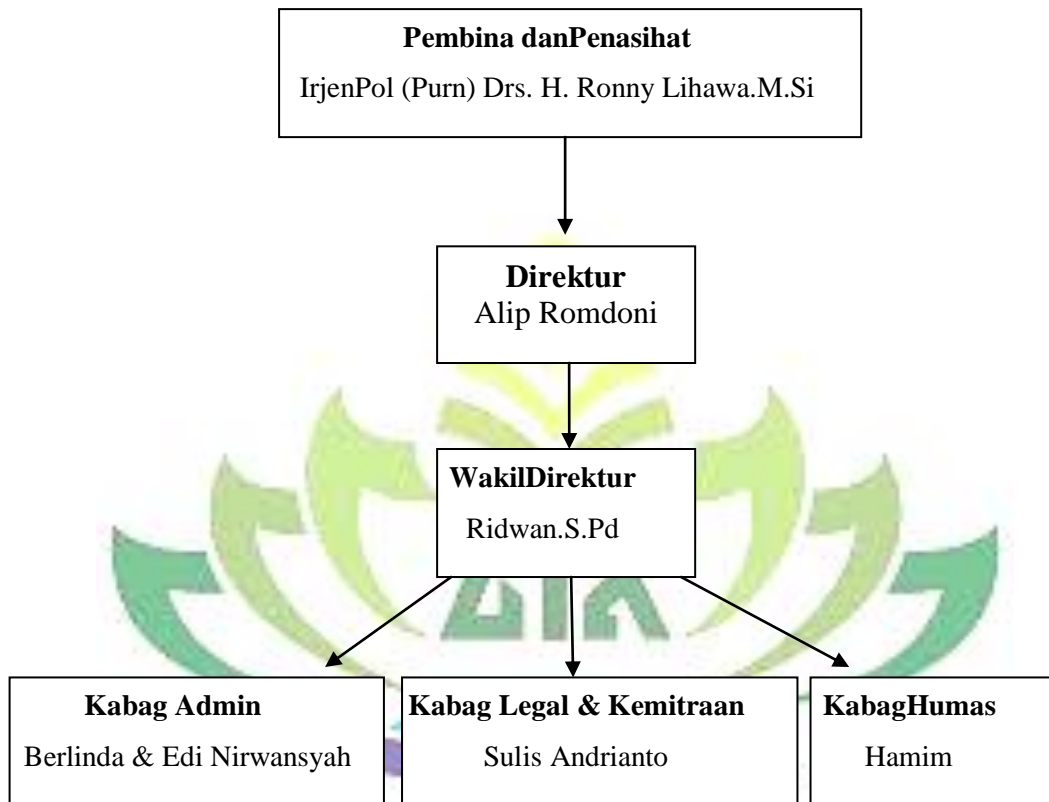
- b. Pengembangan unit-unit pengelola kehutanan yang beragam ke dalam satu kesatuan pengelola kehutanan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- c. Secara terus-menerus dan berkesinambungan membangun kekuatan kompetitif dan peluang usaha untuk menjadi pemimpin di dalam bidang pembibitan dan kehutanan.

3. Struktur Organisasi CV. Alif Jabon

Struktur organisasi merupakan kerangka dari susunan hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi-posisi yang menunjukkan kedudukan terhadap tugas wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Dalam struktur organisasi berkenaan dengan tugas individu terhadap tugas-tugas yang dikerjakan. Pimpinan perusahaan membagi tugas dengan posisi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing individu yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam mengelola usaha dengan kinerja yang profesional.⁹⁶

⁹⁶Wawancara dengan Ridwan, Wakil Direktur CV. Alif Jabon, tanggal 19 Agustus 2018.

Susunan Organisasi CV. Alif Jabon
Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan
Bandar Lampung



TABEL 1
LEGALITAS PERUSAHAAN CV. ALIF JABON

LEGALITAS PERUSAHAAN CV. ALIF JABON	
Akta Pendirian	: 15 Desember 2014 Notaris Dwi Shinta Handini Putri SH, M.Kn
Tanda Daftar Perusahaan	: 07.013.47.04236 Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung
Surat Izin Usaha Perdagangan	: 510.2.1/0024630.19/III.27.2/X/2015 Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung

Pengukuhan Usaha Kena Pajak:S-132 PKP/WPJ.28/KP.0403/2016

KPP Pratama Kedaton

Nomor Pokok Wajib Pajak:74.082.028.7-323.000

KPP Pratama Kedaton

TABEL 2
REKAP PENJUALAN CV. ALIP JABONPO. PRINGSEWU & LAMSEL
(KUPAS-KULIT)

NO	PERIODE	WRD	HARGA IDR	PENJUALAN BRUTO	PPN 10%	PENJUALAN NETTO
1	1-15 AGUSTUS 2016	95.820	1.112,8	106.628.496	10.662.850	117.291.346
2	16-30 AGUSTUS 2016	316.840	1.112,8	352.579.552	35.257.955	387.837.507
3	1-15 SEPTEMBER 2016	647.340	1.112,8	720.359.952	72.035.995	792.395.947
4	16-30 SEPTEMBER 2016	235.160	1.112,8	261.686.048	26.168.605	287.854.653
5	1-31 OKTOBER 2016	1.761.700	1.112,8	1.960.419.760	196.041.976	2.156.461.736
6	1-30 NOVEMBER 2016	1.573.670	1.112,8	1.751.179.976	175.117.998	1.926.297.974
7	1-30 NOVEMBER 2016	77.920	1.031,425	80.368.638.636	8.036.864	88.405.500
8	1-31 DESEMBER 2016	17.380	1.031,425	17.926.167	1.792.617	19.718.783
9	1-31 DESSEMBER 2016	1.213.140	1.112,8	1.349.982.192	134.998.219	1.484.980.411
10	1-31 JANUARI 2017	1.228.900	1.112,8	1.367.519.920	136.751.992	1.054.271.912
11	1-31 JANUARI 2017	140.640	1.031,425	145.059.612	14.505.961	159.565.573
12	1-28 FEBRUARI 2017	926.390	1.031,425	955.501.806	95.550.181	1.051.051.986
13	1-31 MARET 2017	94.800	1.031,425	97.779.090	9.777.909	107.556.999
14	1-31 MARET 2017	331.520	1.112,8	368.915.458	36.891.546	405.807.002
15	1-30 APRIL 2017	962.000	1.112,8	1.070.513.600	107.051.360	1.177.564.960
16	1-31 MEI 2017	878.420	1.112,8	977.505.776	97.750.578	1.075.256.354
17	1-30 JUNI 2017	1.247.760	1.112,8	1.388.507.328	138.850.733	1.527.358.061
18	1-31 JULI 2017	1.383.480	1.012,8	1.539.536.544	153.953.654	1.693.490.198
19	1-31 JULI 2017	1.054.960	1.012,8	1.068.463.488	106.846.349	1.175.390.837
20	1-30 AGUSTUS 2017	2.456.520	1.112,8	2.487.963.456	248.796346	2.736.759.802
21	1-30 AGUSTUS 2017	1.577.900	1.112,8	1.755.887.120	175.588.712	1.931.475.832
22	1-30 AGUSTUS 2017	135.660	1.031,425	139.923.116	13.992.312	153.915.427
23	1-31 SEPTEMBER 2017	1.103.440	1.031,425	1.138.115.602	113.811.560	1.251.927.162
24	1-31 SEPTEMBER 2017	3.640.040	912,425	3.321.263.497	332.126.350	3.653.389.847
25	1-30 OKTOBER 2017	431.940	1.031,425	445.513.715	44.551.371	490.065.086
26	1-30 OKTOBER 2017	4.359.920	912,425	3.978.100.006	397.810.001	4.375.910.007
27	1-30 NOVEMBER 2017	4.279.590	912,425	3.904.804.906	390.480.491	4.295.285.395
28	1-31 DESEMBER 2017	3.532.620	912,425	3.223.250.804	322.325.080	3.545.575.884
29	1-31 JANUARI 2018	2.331.260	912,425	2.127.099.906	212.709.991	2.339.809.896
30	1-28 FEBRUARI 2018	1.432.100	912,425	1.306.683.843	130.668.384	1.437.352.227
31	1-31 MARET 2018	1.495.250	912,425	1.364.303.481	136.430.348	1.500.733.829
32	1-30 APRIL 2018	1.131.680	912,425	1.032.573.124	103.257.312	1.135.830.436
33	1-15 MEI 2018	1.080.370	912,425	985.756.597	98.575.660	1.084.332.257
JUMLAH		43.176.130		42.791.672.569	4.279.167.257	47.070.839.826

Perhitungan SHU 2016-2018:	
Laba Rp. 172	Rp 7.426.294.360
Sukses Fee Rp. 30	Rp 1.295.283.900
Bagi hasil investasi	Rp 5.528.866.663
Operasional gaji karyawan	Rp 971.500.000
Piutang supplier	Rp 895.121.848
Pajak badan 1 %	Rp 427.916.726
Total	<u>Rp (-1.692.394.777)</u>

Sumber Data: CV. Alif Jabon

Dalam table tersebut dapat diartikan bahwa dari tahun 2016-2018 perusahaan mengalami penurunan target yang tidak tercapai, sehingga dalam hal ini perusahaan mengalami kerugian dan kerugian dikarenakan pengeluaran lebih besar dari penghasilan. Kerugian tersebut akan dibebankan kepada pihak investor selaku pemodal dengan cara memotong jumlah keuntungan sebanyak 50% yang akan didapat oleh pihak investor agar perusahaan tetap berjalan.⁹⁷ Dalam hal ini kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaiian pihak pengelola yang mana tidak mempersiapkan diri dari terjadinya kerugian.

Kerugian tersebut menyebabkan pemotongan bagi hasil sebesar 50% yang akan didapat oleh pihak investor, dan membuat perjanjian baru sehingga jumlah keuntungan yang akan didapat berbeda dari perjanjian awal. Adapun pendapatan keuntungan pihak investor yang telah dipotong sebesar 50% di CV. Alif Jabon berjumlah 35 orang yaitu:

⁹⁷ Wawancara, dengan Alif Romdoni, Direktur CV. Alif Jabon, tanggal 19 Agustus 2018.

Tabel 3
Pendapatan Investor CV. Alif Jabon Per Bulan

NO	Nama Investor	Jumlah (Rp)	Bagi Hasil Investasi (Rp)	Tgl Jatuh Tempo	Keterangan Pemotongan 50% dari Nilai Bagi Hasil Awal
1	Agus Subagyo	1.100.000.000	39.285.714	1	Dibayarkan
2	Azharudin	1.000.000.000	35.714.286	3	Dibayarkan
3	Marihot Hasintongan s	180.000.000	-	3	Dikembalikan
3	Herman	100.000.000	3.571.440	4	Dibayarkan
4	Nurhasanah	30.000.000	1.071.400	4	Dibayarkan
5	Suci Marantika Sari	50.000.000	1.785.715	4	Dibayarkan
6	Sudrarsyah	200.000.000	7.142.857	5	Dibayarkan
7	Sutiardi	100.000.000	2.976.190	6	Dibayarkan
8	Sudarto	100.000.000	3.571.000	6	Dibayarkan
9	Tugiran	60.000.000	2.142.840	7	Dibayarkan
10	Intan Meriana	25.000.000	892.850	7	Dibayarkan
11	Danamon	200.000.000	7.142.857	7	Dibayarkan
12	Darmawan	275.000.000	9.821.400	8	Dibayarkan
13	Imam Muhsin	40.000.000	1.428.517	9	Dibayarkan
14	Rio Angger W	70.000.000	2.500.000	10	Dibayarkan
15	Berlinda Chandra D	85.000.000	3.035.714	11	Dibayarkan
16	Sujana	185.000.000	6.607.143	12	Dibayarkan
17	Roni Lihawa	1.000.000.000	23.809.500	18	Dibayarkan
18	Bertalitiya, Spd	100.000.000	3.571.000	19	Dibayarkan
19	Hatitah	50.000.000	1.785.690	19	Dibayarkan
20	Sutiardi	50.000.000	1.488.075	19	Dibayarkan
21	Maryanto	50.000.000	1.785.690	20	Dibayarkan
22	Bahrn	100.000.000	3.571.429	20	Dibayarkan
23	Terip Edward T	100.000.000	5.000.000	21	Dibayarkan
24	Belyza Khairudin C	85.000.000	3.035.714	22	Dibayarkan
25	Ardiena Chandra D	45.000.000	1.607.143	23	Dibayarkan
26	Sarwan, SE	140.000.000	5.000.000	24	Dibayarkan
27	Sugeng Pamuji	150.000.000	5.357.130	24	Dibayarkan
28	Abdul Kholik	50.000.000	1.785.690	25	Dikemablikan Rp.20.000.000,-
29	Azhar Sulaeman	25.000.000	892.857	25	Dibayarkan
30	Syahrul Ali	60.000.000	2.142.840	26	Dibayarkan
31	Harsoyo	25.000.000	892.857	27	Dibayarkan
32	Ryan Intami S	75.000.000	2.678.550	29	Dibayarkan
33	Sawalib	100.000.000	3.571.000	29	Dibayarkan
34	Sarpan	300.000.000	10.714.286	29	Dibayarkan
35	Roni Lihawa	1.000.000.000	23.809.500	29	Dibayarkan
	Jumlah	7.305.000.000	231.188.925		

Sumber Data: CV. Alif Jabon

d. Kerjasama Dengan Instalasi lain⁹⁸

Dalam rangka mewujudkan keadaan yang aman dan nyaman, maka saat ini CV. Alif Jabon selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar usaha yang dioprasikan berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Adapun instansi-instansi tersebut antara lain:

1. Dinas Kehutanan
2. Dinas Perhubungan
3. Dinas Kepolisian

B. Sistem Bagi Hasil Pemilik Usaha dengan Investor di CV. Alif Jabon Suplier dan Bibit Kayu Kehutanan Bandar Lampung

CV. Alif Jabon merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang suplier dan pembibitan kayu kehutanan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang Agri Bisnis terutama dalam pembibitan kayu dan investasi tanaman industri, selain itu untuk membantu memaksimalkan sumber daya manusia dikalangan tingkat petani secara efektifitas dan efisiensi dalam meningkatkan lahan yang kurang produktif, tetapi dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil antara pemilik usaha dengan investor hanya menjalankan di bidang Suplier kayu kehutanan sedangkan bibit kayu kehutanan tidak berkaitan dengan investor karena usaha tersebut adalah usaha sampingan dari CV. Alif Jabon.

Sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor di CV. Alif Jabon berpegang kepada prinsip bagi hasil dan berdasarkan perjanjian secara

⁹⁸ Wawancara, dengan Bpk Sulis Andrianto, Kabag Legal dan Kemitraan CV. Alif Jabon, tanggal 19 Agustus 2018.

tertulis. Perjanjian tersebut dijelaskan oleh karyawan CV. Alif Jabon agar dapat memahami isi dari surat perjanjian. dengan berbagai ketentuan diantaranya adalah:

Pasal I

Ketentuan Umum

1. PIHAK PERTAMA selaku perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola usaha.
2. PIHAK KEDUA selaku pemilik modal dalam bentuk uang menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA akan mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha menurut persentase keuntungan yang telah disepakati bersama.

Pasal II

Modal Usaha

1. Besar uang investasi sebagai nama di sebut pasal 1 ayat 2 adalah sebesar Rp. 75.000.000(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Dana investasi PIHAK KEDUA Tersebut diserahkan kepada PIHAK PERTAMA setelah akad ini di tanda tangani oleh kedua belah pihak, dan diserahkan langsung kepada pihak pertama atas nama CV. Alif Jabon.

Pasal III

Keuntungan

1. Keuntungan bersih usaha, berupa keuntungan yang di peroleh dari kegiatan usaha.

2. Dana investasi PIHAK KEDUA adalah sebesar **Rp.30,-/kg**. Perhitungan keuntungan sebagai berikut: **$75.000.000/Rp.840 \times 1 \text{ Kg} = 89.286,-$**
 $89.286 \text{ Kg} \times Rp. 30 = 2.678.550,-$
3. Keuntungan tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA setelah 30 (tiga puluh) hari dana di investasikan, keuntungan akan dibayarkan secara langsung kepada PIHAK KEDUA.

Pasal IV

Kerugian

1. Jika terjadi kerugian dalam kegiatan usaha maka semua kerugian di maksud, menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal V

Masa Berlaku

1. Masa berlaku perjanjian ini adala 12 (Dua Belas) bulan, terhitung sejak di sepakati dan di tanda tanganinya surat perjanjian ini.
2. Atas kesepakatan kedua belah pihak perjanjiandapat di perpanjang waktunya.
3. Jika PIHAK KEDUA akan menarik dana investasinya dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu bulan sebelumnya.

Pasal VI

Ahli Waris

1. Apabila PIHAK PERTAMA sebagai pengelola investasi dalam masa perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak

dapat melanjutkan atau mengelola usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam perjanjian ini akan di lanjutkan oleh ahli waris atau kuasa yang di tunjuk (secara tertulis) berdasarkan kesepakatan ahli waris PIHAK PERTAMA.

2. Bahwa bila PIHAK KEDUA dalam masa perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia, maka segala urusan yang mengikat dalam perjanjian ini, akan di lanjutkan ahli waris atau kuasa yang di tunjuk (secara tertulis) berdasarkan kesepakatan ahli waris. PIHAK KEDUA.

Pasal VII

Lain-Lain

Bahwa hal-hal yang tidak/belum di atur dalam perjanjian ini akan di putuskan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah serta dengan berpedoman pada ketentuan perjanjian ini, dan di tuangkan secara tertulis dalam perubahan perjanjian serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal VIII

Setatus Hukum

Segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini dan segala akibatnya, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (berdomisili) yang tetap di kantor Kepanitraan Pengadilan Negri.

Surat perjanjian diatas dapat diartikan bahwa pemilik usaha adalah Pihak Pertama sebagai pengelola perusahaan dan investor adalah Pihak Kedua hanya sebatas pemilik modal dan tidak ikut andil dalam pengelolaan

perusahaan. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk bekerjasama sesuai kemampuan masing-masing dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Keuntungan dari kerjasama tersebut ditetapkan di awal perjanjian sehingga tidak ada unsur penipuan dan kecurangan dalam proses pembagian hasil.

Bagi hasil atas kerjasama pemilik usaha dengan investor tersebut merupakan bagi hasil dari dana pembiayaan oleh investor yang dikelola oleh perusahaan sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut akan dibayarkan setelah 1 bulan dana di investasikan sesuai tanggal yang telah ditetapkan.⁹⁹ Dalam pembagian hasil tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati meskipun sudah melakukan akad di awal perjanjian, dikarenakan perjanjian tersebut tidak di taati sehingga merugikan pihak investor.¹⁰⁰ Meskipun terjadi pemotongan jumlah pendapatan sebesar 50% investor masih mendapatkan untung yang cukup besar.¹⁰¹ Sebaiknya apabila melakukan akad dalam perjanjian, bagi hasil kerugian sebaiknya ditanggung bersama sehingga tidak ada yang dirugikan karena sama-sama menanggung kerugian.¹⁰²

Darmawan mengatakan bahwa investasi pada CV. Alif Jabon adalah investasi yang biasa dilakukan para pembisnis untuk bekerjasama dan mendapatkan keuntungan bersama. Penghasilan dari investasi pada CV. Alif

⁹⁹ Wawancara, dengan Bpk Edi Nirwansyah, Kabag Admin tanggal 19 Agustus 2018.

¹⁰⁰ Wawancara, dengan Bpk Sutiardi, Investor tanggal 19 Agustus 2018.

¹⁰¹ Wawancara, dengan Ibu Hatitah, Investor tanggal 19 Agustus 2018.

¹⁰² Wawancara, dengan Ibu Bertalitiya, Investor tanggal 19 Agustus 2018.

Jabon sangat menguntungkan dari pada uangnya di tabung di bank sehingga tidak ada penghasilan.¹⁰³

Imam Mushin mengatakan mengatakan bahwa investasi pada CV. Alif Jabon adalah pendapatan penghasilan dari investor di CV. Alif Jabon ini lumayan untuk tambahan penghasilan alhamdulillah penghasilan yang didapat di CV. Alif Jabon cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses perjanjian yang dilakukan di CV. Alif Jabon berdasarkan perjanjian di awal jadi kedua belah pihak saling bersepakat.¹⁰⁴

Rio Angger mengatakan bahwa investasi pada CV. Alif Jabon kedua belah pihak saling bekerjasama pihak pertama sebagai pengelola modal dan pihak kedua sebagai investor. Investasi pada CV. Alif Jabon ini dilakukan bersama rekan-rekan terdekat dan saling percaya satu sama lain sehingga dalam melakukan kerjasama ini saling menjaga amanah dari kedua belah pihak¹⁰⁵

Berlinda Chandra mengatakan bahwa investasi pada CV. Alif Jabon ini dengan sistem bagi hasil yang terjadi di CV. Alif Jabon sesuai dengan modal yang di investasikan ke pihak pertama sebagai pengelola usaha. Setiap investor berbeda-beda pendapatannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perjanjian yang terjadi sudah disepakati kedua belah pihak akan tetapi pihak pertama (pengelola usaha) melakukan pelanggaran dari perjanjian yang telah disepakati.¹⁰⁶

¹⁰³Wawancara, dengan Bpk Darmawan, Investor tanggal 8 November, 2018.

¹⁰⁴Wawancara, dengan Bpk Imam Muhsin, Investor tanggal 9 November, 2018.

¹⁰⁵Wawancara, dengan Bpk Rio Angger W, Investor tanggal 10 November, 2018.

¹⁰⁶Wawancara, dengan Ibu Berlinda Candra, Investor tanggal 11 November, 2018.

Sujana mengatakan bahwa investasi pada CV. Alif Jabon pihak pertama menyatakan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya tetapi kenyataannya pihak kedua (investor) ikut menanggung kerugian yang terjadi. Pihak pertama seharusnya mentaati perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga tidak merugikan salah satu pihak, akan baiknya apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan usaha di tanggung bersama sesuai kesepakatan di awal perjanjian.¹⁰⁷

Sistem bagi hasil berdasarkan pada pasal-pasal dalam perjanjian dengan sistem presentase berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan kepada pihak pertama (pemilik usaha). Sehingga setiap investor lainnya akan berbeda-beda pendapatannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak pertama melakukan pelanggaran, karena tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Hal ini dikarenakan pihak pertama menyatakan perjanjian dalam pasal ke IV tentang Kerugian sebagai berikut “jika terjadi kerugian dalam kegiatan usaha maka semua kerugian di maksud, menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (pemilik usaha)”.

¹⁰⁷ Wawancara, dengan Bpk Sujana, Investor tanggal 12 November, 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sistem Bagi Hasil Pemilik Usaha Dengan Investor CV.Alif Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung

Praktik bagi hasil yang dilakukan antara pemilik usaha dan investor pada CV.Alif Jabon Sukarame Bandar Lampung adalah dengan sistem presentase. Sistem presentase yang digunakan oleh CV.Alif Jabon ini berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan kepada pengelola usaha, sehingga setiap investor lainnya akan tidak sama pendapatannya dikarenakan modal yang di investasikan berbeda-beda. Berikut adalah contoh dari keuntungan bagi hasil yang dilakukan antara pemilik usaha dan investor:

1. Ibu Hatitah investasi uang sebesar Rp. 50.000.000

Presentase keuntungan usaha untuk PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp.30,-/Kg, Perhitungan keuntungan sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 50.000.000 / \text{Rp.}840 \times 1 \text{ Kg} = 59.524 \text{ Kg} \times \text{Rp.}30 = \text{Rp.}1.785.714,-$$

2. Ryan Intami S investasi uang sebesar Rp. 75.000.000

Presentase keuntungan usaha untuk PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp.30,-/Kg, Perhitungan keuntungan sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 75.000.000 / \text{Rp.}840 \times 1 \text{ Kg} = 89.285 \text{ Kg} \times \text{Rp.}30 = \text{Rp.}2.678.571,-$$

Keuntungan tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA setelah 30 hari dana di investasikan, keuntungan tersebut akan di bayarkan secara langsung kepada PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem bagi hasil antara pemilik usaha dengan investor pada CV.Alif Jabon Sukarame Bandar Lampung telah melakukan akad diawal perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak pertama melakukan pelanggaran, karena tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Dalam perjanjian pasal IV bagian Kerugian menyatakan sebagai berikut “jika terjadi kerugian dalam kegiatan usaha maka semua kerugian di maksud, menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (pemilik usaha)”. Realitas dalam pelaksanaannya kerugian tersebut dibebankan kepada pihak kedua (investor) dengan melakukan perjanjian baru. Dalam perjanjian tersebut terjadi perubahan dalam pembagian keuntungan. Dimana pihak kedua (investor) mendapatkan pemotongan pendapatan sebesar 50% dari keuntungan awal yang sebelumnya Rp.60,-/Kg menjadi Rp.30,-/Kg, sehingga pihak kedua (investor) merasa dirugikan.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pemilik Usaha dengan Investor CV.Alif Jabon Suplier dan Pembibitan Kayu Kehutanan Sukarame Bandar Lampung

Sistem bagi hasil dalam kerjasama ini menggunakan konsep bagi hasil atau dalam Islam *mudharabah*, keuntungan dibagi dengan kesepakatan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Pembagian hasil dari kerjasama CV.Alif Jabon dihitung dengan persentase sehingga pembagian hasil kerjasama telah ditetapkan di awal perjanjian sesuai dengan modal yang di investasikan kepada pihak pertama (pemilik usaha).

Sistem bagi hasil yang dipraktikan dalam kerjasama pemilik usaha dengan pemilik modal pada CV.Alif Jabon tidak sesuai dengan hukum Islam. berikut adalah ketidak sesuaiian dalam hukum Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S.Ali Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: "Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.(Q.S. Ali Imran ayat 76).¹⁰⁸

Allah menegaskan supaya setiap orang selalu menepati segala macam janji dan menunaikan amanah yang telah dipercaya kepadanya. Karena itu, jika ada orang yang meminjamkan harta dengan penetapan waktu, hendaklah dipenuhi janji itu dengan mengembalikan harta itu tepat pada waktunya. Allah menyebutkan pahala bagi orang-orang yang sudah menepati janjinya karena termasuk dalam kategori takwa. Keterangan ini untuk memberikan pengertian bahwa menepati janji termasuk perbuatan yang diridhai Allah.

Dalam pelaksanaan pembagian kerugian perjanjian pada Pasal IV bagian Kerugian menyatakan sebagai berikut "jika terjadi kerugian dalam kegiatan usaha maka semua kerugian di maksud, menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (pemilik usaha)". Seharusnya pembagian kerugian sebaiknya proporsional sesuai dengan hukum Islam, dalam hal ini *mudharabah muthlaqah*, karena *mudharib* (investor) memberi cakupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis kepada *shahibul maal* (pengelola dana). Maka apabila mendapatkan

¹⁰⁸Q.S. Ali Imran (3):76.

keuntungan dibagi secara proporsional sesuai nisbah, dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal (investor) selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha. Sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Kerjasama sistem bagi hasil di atas hampir memenuhi semua rukun dan syarat dalam sistem bagi hasil. Namun praktiknya tidak sesuai dari teori hukum Islam dimana pelaksanaan sistem bagi hasil dalam penelitian ini berbeda antara teori dan praktik di lapangan. Dengan demikian, perspektif hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor di CV. Alif Jabon ini belum sepenuhnya menggunakan konsep sistem bagi hasil yang berlandaskan hukum Islam, karena pihak pemilik usaha dan pemilik modal tidak melakukan sistem kelola kerugian sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana apabila mendapat keuntungan maka di bagi bersama dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal (investor) selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor (Studi CV. Alif Jabon suplier dan pembibitan kayu kehutanan Sukarame Bandar Lampung), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil pemilik usaha dan investor CV. Alif Jabon suplier dan pembibitan kayu kehutanan Sukarame Bandar Lampung yaitu berdasarkan perjanjian secara tertulis. Jika terjadi kerugian dalam kegiatan usaha maka semua kerugian di maksud, menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Realitas dalam pelaksanaannya kerugian tersebut dibebankan kepada pihak kedua (investor) dengan melakukan perjanjian baru. Dalam perjanjian tersebut terjadi perubahan dalam pembagian keuntungan. Dimana pihak kedua (investor) mendapatkan pemotongan pendapatan sebesar 50% dari keuntungan awal yang sebelumnya Rp.60,-/Kg menjadi Rp.30,-/Kg, sehingga pihak kedua (investor) merasa dirugian.
2. Pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemilik usaha dengan investor suplier dan pembibitan kayu kehutanan Sukarame Bandar Lampung sebagaimana disebutkan diatas tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, dalam hal ini adalah sistem pembagian kerugian perjanjian pada perjanjian IV bagian Kerugian menyatakan sebagai berikut "jika terjadi kerugian

dalam kegiatan usaha maka semua kerugian di maksud, menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (pemilik usaha).” Sistem bagi hasil semestinya dilakukan sesuai proporsional sesuai dengan hukum Islam, dalam hal ini *mudharabah muthlaqah*, karena mudharib (investor) memberi cakupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis kepada *shahibul maal* (pengelola dana). Maka apabila mendapatkan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai nisbah, dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal (investor) selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha. Sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Untuk CV. Alif Jabon selaku pengelola perusahaan agar dapat meminimalisir resiko dari kerugian, dan akad yang dilakukan antara kedua belah pihak harus di taati dan dilaksanakan agar tidak ada yang dirugikan.
2. Untuk investor di CV. Alif Jabon harus memiliki rasa simpati terhadap pihak lain sehingga terhindar dari sifat memaksa.
3. Untuk kalangan Umum apabila melakukan suatu kerjasama haruslah teliti dan saling jujur dalam melakukan kerjasama sehingga terhindar dari kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi*, jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ahmad, Az-Zarqa Mustafa, *Al-Madkhui al-Fiqhi al-'Am al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Qolam, t.th.
- Al-Munawir, A. Warson, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Asad Muhammad, *The Message of the Quran*, Gibraltar: Dar Al Andalus, 1985.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ash, Hasbi Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1984.
- Bin Shalih, Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, Jakarta, Darul Falah, 2005.
- Daud, Abu, *Kitab Sunah Darul Fikri*, Jilid 2, Bairut, 1994/1414
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamil, Faturrahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman, Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001.

Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-2, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.

Hasan, Ali, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam; Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Helmi, Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Hishan, Ibnu, *Al Syirat Al Nabawiyah*, Kairo: Mustafa Al Babi Al Halabi, 1955.

Izzan, Ahmad, *et al.*, *Refrensi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Ja'far, Abu Muhammad bun Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al-Quran*: penerjemah, Ahsan Askan; Editor, Besus Hidayat Amin, Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Ja'far, Kumedi *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Mahmudah, Siti, *Historisitas Syari'ah Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abd Al-Karim*, Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2016.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Margon, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2015.

Muhammad, Izzudin Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami*, Jeddah: Dallah al-Baraka, 1993.

Muslehuiddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Noer Saleh, Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung, 1989.

Pabundu, Muhammad Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Penjelasan Pasal 19 huruf c UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hanafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. 1, Jakarta: Robani Pers, 1977.
- Qureshi, *Mudharabah and Its Modern Application*, Lahore: Muhammad Ashraf, 1967.
- Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Puataka Setia, 2001.
- Sarakhsi, *Kitab Al-Mahsuh*, Istanbul: Dar Al-Dakwah, 1983.
- Shawkani, *Nayl Al-Awtar*, Istanbul: Dar Al-Dakwah Al-Islamiah. Tanpa tahun.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syafiie, Muhammad Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syafiie, Muhammad Antonio, *Bnak Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Taimiyah, Ibn, *Majmu' Fatwa Syaikh Al Islam*, Mecca: Maktabat Al-Nahda Al-Haditha, 1404 H.
- Wahab Khalaf, Abu, *Ilmu Usul Fiqh*, (Terj). Nasroen Haroen, Jakarta: CV. Amzah, 1992.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

PANDUAN WAWANCARA
Responden: Karyawan CV. Alif Jabon

1. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Alamat :

2. Daftar Pertanyaan :

- a. Sejarah berdirinya CV. Alif Jabon Bandar Lampung ?
- b. Bagaimana struktur organisasi CV. Alif Jabon ?
- c. Apa saja visi dan misi CV. Alif Jabon ?
- d. Seperti apa sistem bagi hasil di CV. Alif Jabon ?
- e. Siapa saja yang berinvestasi di CV. Alif Jabon ?
- f. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan di CV. Alif Jabon Bandar Lampung ?

PANDUAN WAWANCARA
Responden: Investor

1. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Alamat :

2. Daftar Pertanyaan :

- a. Apakah anda sudah lama berinvestasi di CV. Alif Jabon Bandar Lampung ?
- b. Apakah alasan anda berinvestasi di CV. Alif Jabon ?
- c. Berapakah penghasilan anda perbulan ?
- d. Bagaimana proses perjanjian dan sistem bagi hasil di CV. Alif Jabon ?
- e. Apa saja isi dari perjanjian kerjasama tersebut ?

